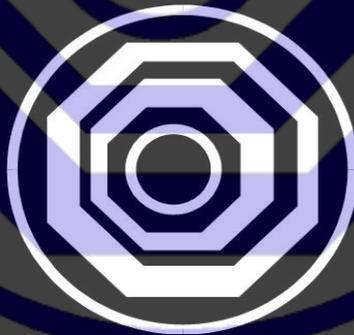


**REPRESENTASI POPULIS DAN IMPLIKASINYA
BAGI DEMOKRASI: TELAAH KRITIS ATAS
PEMIKIRAN POLITIK NADIA URBINATI
TENTANG POPULISME DAN DEMOKRASI**

RINGKASAN DISERTASI

Oleh

Pius Pandor
NIM: 0870108519
[Program Doktor]



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

2023

**REPRESENTASI POPULIS DAN IMPLIKASINYA
BAGI DEMOKRASI: TELAAH KRITIS ATAS
PEMIKIRAN POLITIK NADIA URBINATI
TENTANG POPULISME DAN DEMOKRASI**

Disertasi ini dipertahankan pada Sidang Terbuka
Komisi Program Pascasarjana,
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Sabtu, 25 November 2023

Pius Pandor

NIM: 0870108519

[Program Doktor]



Promotor : Dr. Karlina Supelli

Ko-promotor 1 : Prof. Dr. Antonius Sudiarja

Ko-promotor 2 : Dr. Robertus Robet

Penguji 1: Prof. Dr. FX. Armada Riyanto

Penguji II: Yanuar Nugroho, P.hD

Penguji III: Dr. Simon Lili Tjahjadi

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

2023

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	3
1.1. Rumusan Masalah.....	4
1.2. Tesis Penelitian.....	4
1.3. Tujuan.....	7
1.4. Metode.....	7
2. Kerangka Teoritis.....	8
3. Hasil dan Pembahasan.....	9
4. Kesimpulan, kontribusi, alur baru, keterbatasan dan agenda penelitian mendatang.....	15
4.1 Kesimpulan.....	15
4.2 Kontribusi	17
4.3 Alur Baru.....	22
4.4 Keterbatasan Penelitian.....	24
4.5 Agenda penelitian mendatang.....	25
Ucapan Terima Kasih.....	29
Riwayat Hidup.....	31

1. Pendahuluan

Penelitian ini membahas representasi populis dan implikasinya bagi demokrasi. Dalam ranah empiris, duduk persoalan representasi populis yang menjadi fokus dalam penelitian ini berawal dari munculnya gelombang populisme dan gerakan politik langsung yang menerjang rumah demokrasi di berbagai negara. Gelombang populisme dan gerakan politik langsung tersebut menggugat kemapanan politik dengan agenda ganda ‘membawa politik kepada rakyat dan membawa rakyat kepada politik’ yang menuntut kemurnian kehendak rakyat, spontan, langsung dan tanpa perantara. Dalam ranah teoritis, duduk persoalan representasi populis berkaitan erat dengan metafisika politik tentang siapa yang memiliki legitimasi untuk mengisi ruang kosong kekuasaan. Paham representasi sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam diri seorang pemimpin berbeda dengan paham representasi sebagai mandat politik. Dalam representasi mandat, perwakilan secara formal dipilih berdasarkan suara yang mewakili rakyat, sedangkan dalam representasi populis, perwakilan sebagai perwujudan rakyat dan bertindak sebagai rakyat. Kedua paham ini dalam teori politik berkaitan erat dengan perdebatan tentang metafisika presentasi dan representasi yang diwakili Jean-Jacques Rousseau dan Thomas Hobbes. Yang pertama mengidealkan presentasi langsung, sedangkan yang kedua menonjolkan representasi sebagai parameter untuk mengatur roda pemerintahan demokratis. Perdebatan tersebut kemudian memuncak dengan munculnya palingan representasi konstruktivis dalam teori demokrasi yang mengafirmasi bahwa hanya melalui representasi rakyat dapat dihadirkan [*presen*], jika tidak, rakyat tidak ada [*absen*].

Nadia Urbinati, pemikir politik Italia-Amerika dari Universitas Columbia, Amerika Serikat membaca fenomena populisme sebagai bentuk baru pemerintahan perwakilan yang didasarkan pada relasi langsung antara pemimpin dengan rakyat dalam masyarakat yang didefinisikan oleh pemimpinnya sebagai orang [rakyat] baik dan benar serta memiliki otoritas lebih atas rakyat kebanyakan. Menurut

Urbinati, representasi sebagai perwujudan rakyat dalam diri seorang pemimpin bermasalah bagi demokrasi.

1.1 Rumusan Masalah

Pertanyaan mayor yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah mengapa representasi populis menjadi masalah sehingga membawa implikasi bagi demokrasi? Dari pertanyaan mayor ini, muncul tiga pertanyaan minor:

- 1) Apa yang dimaksud dengan representasi populis dalam pemikiran Urbinati?
- 2) Apa strategi politik kaum populis dalam demokrasi, dan masalah apa yang muncul dari paham representasi populis bagi demokrasi?
- 3) Bagaimana memahami representasi populis dari lensa realisme politik?

1.2 Tesis Penelitian

Berdasarkan beberapa pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di muka, tesis utama penelitian ini adalah representasi populis tanpa pendidikan politik yang kritis, inklusif dan plural, rakyat hanya menjadi penanda kosong [*empty signifier*], seperti bejana konseptual yang bisa diisi apa saja. Sebagai bejana kosong, rakyat dalam wacana populis memperoleh arti lewat afirmasi dan negasi berdasarkan agenda politik kaum populis. Pentingnya pendidikan politik yang kritis, inklusif dan plural berkaitan erat dengan persoalan legitimasi kekuasaan yaitu kelenturan arti rakyat dalam populisme dan paradoks kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Kelenturan arti rakyat menjadi celah kosong bagi kaum populis untuk mengonstruksi rakyat mana suka. Rakyat bisa digunakan untuk menyatukan atau memecah belah, menyamakan atau membedakan, melawan kelompok elite atau melawan warga biasa, melemahkan atau menguatkan dan sebagainya. Dalam demokrasi, legitimasi kekuasaan memang bertumpu pada rakyat, namun kedaulatan rakyat merupakan gambaran suatu tempat kosong, tidak mungkin diduduki, demikian hingga mereka yang

menjalankan otoritas publik tidak pernah bisa mengklaim telah memilikinya. Demokrasi menggabungkan dua prinsip yang tampak kontradiktif ini: di satu pihak, kekuasaan berasal dari rakyat; di lain pihak, kekuasaan itu tidak dimiliki siapa pun.

Dari tesis utama di atas, muncul empat sub tesis turunan sebagai berikut:

Sub tesis pertama, representasi populis menempatkan figur sentral pemimpin yang menyatukan beragam kelompok dengan klaim-klaimnya untuk mencapai konsensus sebagai perwakilan resmi negara dan warga masyarakat. Untuk mewujudkan proyek strategis tersebut, kaum populis menekankan proses perubahan elemen-elemen formal dan institusional demokrasi dengan mengusulkan praktik representasi yang lebih memperhatikan pembuatan klaim. Proses pembuatan klaim ini berkaitan dengan dua hal yaitu pembuatan opini dan pengambilan keputusan. Dalam pembuatan opini, rakyat disatukan dalam diri seorang figur pemimpin yang secara resmi bertindak atas nama rakyat. Sedangkan dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin populis berperan sebagai figur karismatik yang mampu menyatukan rakyat dari berbagai klaim. Agar pembuatan opini dan proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik, kaum populis memperjuangkan presentasi langsung pemimpin dengan rakyat yang dilihat sebagai strategi politik untuk mendapatkan kekuasaan. Namun representasi langsung hanya merupakan strategi politik, karena kaum populis tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam demokrasi konstitusional.

Sub tesis kedua, kaum populis memiliki strategi politik mengubah makna unsur-unsur utama demokrasi perwakilan seperti rakyat, mayoritas, dan pemilihan perwakilan sehingga menghasilkan demokrasi populis. Makna rakyat bisa merujuk sebagai bangsa, sebagai kaum jelata, banyak orang atau tiap orang. Bisa juga menunjuk keseluruhan atau bagian, bisa pula menyatukan atau memecah. Meminjam terminologi Laclau, rakyat bagi kaum populis merupakan penanda kosong yang bisa dikonstruksi dengan cara apa pun. Demikian pula dengan makna mayoritas, dan pemilihan

perwakilan. Kaum populis tidak memahami mayoritas sebagai metode untuk menentukan kemenangan terhadap mereka yang berkontestasi dalam demokrasi tetapi sebagai kekuatan [*power*] untuk mengklaim diri sebagai orang benar dan baik dengan melancarkan strategi *satanisasi* musuh atau merendahkan kelompok lain. Akhirnya kaum populis menggunakan pemilihan sebagai formalitas untuk menyatukan klaim dan untuk memenangkan kontestasi dalam demokrasi elektoral.

Sub tesis ketiga, representasi populis menjadi masalah dalam demokrasi karena mengabaikan prinsip *diarki* yang terdiri atas kehendak dan opini. Kehendak berkaitan erat dengan pemilihan perwakilan, prosedur formal, lembaga otoritatif demokrasi, dan aturan mayoritas sebagai cara penataan representasi politik sedangkan opini berkaitan dengan domain ekstra konstitusional yang melibatkan partisipasi warga dalam memengaruhi kebijakan publik. Masalah-masalah yang dimunculkan representasi populis bagi demokrasi adalah sebagai berikut: *Pertama*, sentralisasi kekuasaan dengan memobilisasi mayoritas sehingga melanggar *checks and balances* serta pemisahan kekuasaan dalam demokrasi; *Kedua*, anti-pluralis dengan melegitimasi kekuasaan tirani mayoritas yang mengabaikan hak-hak minoritas, dan meminimalkan pengaruh oposisi politik; *Ketiga*, rusaknya legitimasi demokrasi sehingga mengganggu kerja lembaga independen di luar pemerintahan yang penting bagi demokrasi.

Sub tesis keempat, dari lensa realisme politik, representasi populis merusak relasi representasi akibat menguatnya dominasi elite sehingga menimbulkan tegangan permanen antara legitimasi dan kepercayaan, keputusan dan penilaian, rakyat dan elite, pemerintah dan warga, yang mewakili dan yang diwakili, dalam institusi dan di luar institusi, yang politik dan yang sosial.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk merumuskan secara normatif dari sudut filsafat politik atas konsep representasi populis dan

implikasinya bagi demokrasi berdasarkan telaah kritis atas pemikiran politik Nadia Urbinati tentang demokrasi dan populisme. Karena itu tujuan penelitian ini adalah; *Pertama*, memahami gagasan Urbinati tentang representasi populis, dan strategi politik yang dilakukan kaum populis dalam demokrasi. *Kedua*, memahami gagasan Urbinati tentang masalah-masalah representasi populis dari lensa demokrasi diarki. *Ketiga*, menemukan kebaruan pemikiran Urbinati melalui pembacaan kritis dari lensa realisme politik dan implikasi-implikasinya bagi demokrasi. *Keempat*, menemukan kemungkinan relevansi pemikiran Urbinati dalam konteks Indonesia.

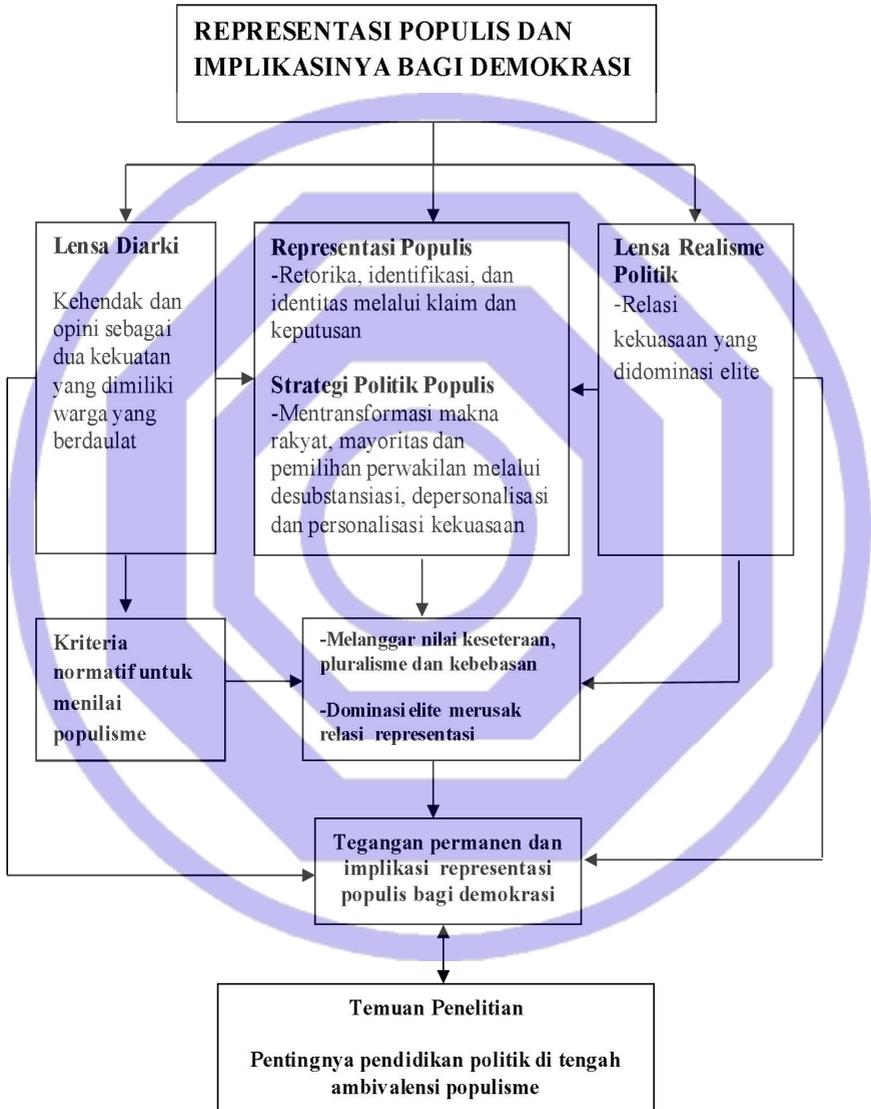
1.4 Metode Penelitian

Untuk menemukan konstruksi berpikir ‘representasi populis dan implikasinya bagi demokrasi’ berdasarkan telaah kritis atas pemikiran politik Nadia Urbinati tentang demokrasi dan populisme, penulis menggunakan pendekatan normatif dari sudut filsafat politik. Filsafat politik merupakan upaya untuk memahami hakikat perkara politik dan tatanan politik yang benar dan baik. Penelitian ini menggunakan lensa realis terhadap kehidupan politik. Pendekatan realis berargumen bahwa politik bukan tentang prinsip moral tetapi tentang relasi kekuasaan yang berada dalam tegangan permanen antara rakyat dan elite, legitimasi dan kepercayaan, formal dan informal, yang politik dan yang sosial.

Melalui lensa realisme politik, penulis akan menelusuri konsep representasi populis yang dikaji secara sistematis dari beberapa sumber yang ditulis Nadia Urbinati sendiri dan beberapa tokoh yang menjadi rujukan utama dalam tulisan-tulisannya sambil membaca peristiwa-peristiwa *real* politik yang terus muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu meneropong representasi populis dari lensa diarki dan realisme politik.

2. Kerangka Teoritis

Secara garis besar kerangka teoritis yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bertitik tolak dari kerangka teoritis di muka, pokok-pokok argumen yang ditampilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, memperlihatkan bahwa duduk persoalan representasi populis berkaitan erat dengan metafisika politik tentang siapa yang memiliki legitimasi untuk mengisi ruang kosong kekuasaan dengan menonjolkan paham representasi sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam diri seorang pemimpin. Melalui paham ini, pemimpin populis dipandang sebagai figur yang menyatukan beragam klaim dari berbagai kelompok masyarakat. Pemimpin tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang mengadvokasi berbagai kepentingan berdasarkan prinsip akuntabilitas sebagaimana dipraktikkan dalam demokrasi perwakilan, tetapi sebagai figur yang menyatukan beragam kelompok dengan klaim-klaimnya untuk mencapai konsensus sebagai perwakilan masyarakat dan negara. Apa yang diusulkan populisme dengan representasi sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam diri seorang pemimpin adalah untuk mengisi kesenjangan dengan identifikasi emosional seluruh rakyat dengan seorang pemimpin. Karena itu, kaum populis mengusulkan seorang pemimpin yang mampu menciptakan subjek kolektif melalui propaganda yang efektif dengan mengatakan 'saya adalah rakyat' [*me the people*].

Kedua, menunjukkan bahwa kaum populis memiliki strategi politik mentransformasi makna unsur-unsur utama demokrasi seperti rakyat, mayoritas dan pemilihan perwakilan. Terkait mentransformasi makna rakyat, populisme mengambil keuntungan dari ketidakpastian struktural konsep rakyat demokratis sehingga menjadi tegangan permanen antara "rakyat" sebagai tempat subjek kolektif dan klaim, dan "rakyat" sebagai kedaulatan kolektif yang tidak dapat diidentifikasi dengan salah satu subjek dan klaim. Dalam tegangan permanen ini muncul kelenturan makna "rakyat" bisa menunjuk "keseluruhan atau bagian populasi", bisa pula menyatukan atau memecah. Ambiguitas semantik itulah yang membuat rakyat menu lezat di mulut para politisi, demagog dan propagandis. Untuk

mengatasi kelenturan makna rakyat, kaum populis melancarkan strategi politik dengan mengonstruksi rakyat yang terdiri atas satu bagian yang dikecualikan. Terkait transformasi mayoritas, Urbinati mencermati perubahan gagasan mayoritas sebagai aturan untuk pengambilan keputusan menjadi dominasi membuat keputusan. Proses pengambilan keputusan demokrasi konstitusional berdasarkan mayoritas numerik, sedangkan dalam demokrasi populis campuran mayoritas prosedural dan mayoritas sosial karena mempromosikan kebijakan yang menerjemahkan kepentingan mayoritas ke dalam undang-undang atau kebijakan. Karena itu, Urbinati melihat bahwa gagasan mayoritas kaum populis bersifat *merelatrik*, perhatian militan terhadap kepentingan satu bagian dalam masyarakat dan mengabaikan kepentingan bagian lain dalam masyarakat. Menggabungkan prinsip mayoritas sebagai prosedur dan sebagai kekuatan sosial diterjemahkan menjadi kehendak mayoritas yang dinyatakan sebagai kehendak orang-orang [rakyat] baik. Strategi politik kaum populis dalam mentransformasi makna rakyat dan mayoritas membawa konsekuensi pada makna pemilihan sebagai prosedur mendulang suara. Dalam konteks ini, pemilihan umum tidak mewujudkan mayoritas karena mereka mempromosikan mayoritas yang sudah dikonstruksi yaitu orang-orang [rakyat] “baik” atau “asli” yang dimunculkan oleh pemimpin populis untuk meraih kemenangan. Mayoritas populis bukanlah mayoritas di antara yang lain seperti dalam demokrasi konstitusional tetapi merupakan mayoritas “baik” yang legitimasinya tidak hanya berciri numerik, tetapi juga berciri etis baik secara moral, sosial, dan budaya. Merekaah pemilik politik, sosial, ekonomi dan budaya. Mayoritas populisme dinilai Urbinati lebih otonom dan unggul daripada mayoritas dalam demokrasi prosedural.

Ketiga, memperlihatkan bahwa dari lensa *diarki* [kehendak dan opini], representasi populis melanggar batas luar nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, pluralisme dan kesamaan. Konseptualisasi demokrasi sebagai *diarki* membuat dua klaim: 1) ‘kehendak’ dan ‘opini’ merupakan dua kekuatan warga negara yang berdaulat, dan 2) keduanya berbeda [kehendak dan opini] dan harus

tetap berbeda, meskipun saling membutuhkan komunikasi berkelanjutan. Kehendak yang merupakan sisi obyektif kedaulatan berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur demokrasi berjalan sebagaimana adanya. Sisi obyektif kedaulatan selalu berada dalam tegangan permanen antara apa yang menjadi kehendak negara, kehendak rakyat, dan kehendak pribadi perwakilan. Sedangkan opini yang merupakan sisi subjektif kedaulatan selalu berada dalam tegangan permanen antara opini umum, politik, dan pribadi. Tegangan permanen ini, akan berpengaruh pada proses dan prosedural representasi politik, baik dalam institusi maupun di luar institusi negara. Demokrasi *diarki* yang terdiri atas kehendak dan opini mengalami pembusukan karena masuknya pengaruh kekuasaan dalam dua domain tersebut sehingga merusak hubungan representasi. Dalam representasi populis, kaum populis tidak hanya sekadar melancarkan retorika dan protes politik, tetapi ingin “menduduki” lembaga-lembaga perwakilan untuk memenangkan mayoritas dengan ideologinya.

Keempat, menunjukkan bahwa representasi populis jika diteropong melalui lensa realisme politik, ternyata banyak terdapat agenda politik formal dan informal yang melanggengkan dominasi elite sementara rakyat yang sejatinya sebagai dasar legitimasi demokrasi hanya dilihat sebagai penanda kosong [*empty signifier*]. Dengan demikian terdapat tegangan permanen antara apa yang menjadi kehendak rakyat dan elite dalam prosedur demokrasi terkait memperebutkan ruang kosong kekuasaan. Rakyat menghendaki ruang kosong kekuasaan sebagai ruang terbuka untuk semua berdasarkan prinsip kebebasan, pluralisme dan kesetaraan, sementara elite mengisi ruang kosong kekuasaan dengan strategi sentralisasi dan privatisasi kekuasaan yang melanggengkan politik *klientelistik* seperti kekerabatan, nepotisme dan korupsi.

Kelima, memperlihatkan bahwa dari lensa *diarki* dan realisme politik, representasi populis yang menjadi fokus dalam penelitian ini berada dalam tegangan permanen antara legitimasi dan kepercayaan, keputusan dan penilaian, rakyat dan elite, pemerintah dan yang

diperintah, yang mewakili dan yang diwakili, dalam institusi dan di luar institusi, dan yang politik dan yang sosial. Karena berada dalam tegangan permanen, representasi populis membawa beberapa implikasi bagi demokrasi: 1] *Antropologis*: mengawal proses demokratisasi dan de-demokratisasi di bawah tatapan mata dan suara rakyat; 2] *Praktis*: merancang kebijakan publik yang bertanggung jawab dan akuntabel; 3] *Epistemologis*: berdemokrasi dalam semangat republikanisme karena menyediakan sejumlah perspektif dan preposisi seperti kebaikan bersama, keutamaan wargawi, partisipasi warga, kewarganegaraan aktif, dan keberanian untuk memperjuangkan kebaikan bersama. 4] *Pedagogis*: mengembangkan pendidikan politik yang kritis, plural, dan inklusif. Unsur kritis mengikuti paradoks demokrasi yang perlu dilihat sebagai tantangan akan pentingnya pendidikan kemanusiaan yang berfokus pada peningkatan kapabilitas. Unsur plural hendak menyatakan bahwa dalam demokrasi ada dua unsur konstitutif yang saling berkaitan yaitu pluralitas kepentingan dan nilai yang dimiliki bersama dalam kelompok, dan keterbukaan masyarakat terhadap kelompok lainnya.¹ Unsur inklusif hendak menyatakan bahwa untuk melawan praktik demokrasi eksklusif yang diperjuangkan kaum populis, kiranya perlu dikembangkan pendidikan politik yang mempromosikan demokrasi inklusif yang menekankan kolaborasi.

Keenam, menunjukkan bahwa dalam terang filsafat politik, representasi populis yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan upaya kaum populis menafsir demokrasi yang berfokus pada tiga klaim: (1) keadaan politik, (2) logika politik, dan (3) legitimasi demokrasi. Keadaan politik berkaitan dengan elemen dasar, pembagian dan kesatuan masyarakat, serta motif tindakan aktor politik. Logika politik terkait unsur inti, dinamika dan tujuan politik. Legitimasi berkaitan dengan apa yang membuat keputusan politik diterima atau legitim.

¹ John Kekes, *The Morality of Pluralism* (Princeton New York: Princeton University Press, 1993), 150.

Terkait keadaan politik, populisme mengklaim bahwa 1] elemen dasar masyarakat adalah “rakyat” dan “elite”, bukan pluralitas individu dan kelompok; 2] dua kubu yang ada dalam masyarakat tersebut merupakan kelompok identitas yang bersatu dan saling mengeksklusi, bukan kelompok identitas yang terpecah secara internal dan terbuka satu sama lain; 3] secara radikal hubungan rakyat dan elite berciri antagonistik, bukan agonistik; 4] pembagian antara rakyat dan elite berciri moral, bukan sosial; 5] perpecahan sosial merupakan produk dari kepentingan pribadi, korupsi, nepotisme, dan identitas kelompok, bukan perbedaan ideologi politik atau partai atau status sosial.

Berkaitan dengan logika politik, populisme mengklaim bahwa 1] politik merupakan pertarungan semua atau tidak sama sekali dengan pecundang total dan pemenang total [tirani mayoritas], bukan masalah akomodasi, kompromi, atau permainan terbuka di mana kemenangan selalu bersifat parsial; 2], politik berkaitan dengan kehendak dan keputusan, bukan justifikasi dan musyawarah; 3], politik pada hakikatnya adalah tentang mobilisasi rakyat yang tidak termediasi dan berciri non institusional.

Legitimasi demokrasi terkait apa yang membuat pelaksanaan kekuasaan politik dapat diterima atau legitim. Enam klaim kaum populus tentang legitimasi: 1], hanya sebagian jumlah penduduk yang benar-benar rakyat atau *demos* yang seharusnya berkuasa; 2], rakyat memiliki kehendak bersama yang dapat diidentifikasi secara independen dari prosedur dan institusi politik; 3]. dalam keputusan politik, kehendak rakyat harus dinyatakan dengan segera dan langsung tanpa mengakomodasi kepentingan lawan dan minoritas politik; 4], populisme harus mengakui dan memulihkan kedudukan istimewa rakyat; 5], rakyat hanya dapat diwakil oleh perwakilan yang sah, dan memiliki hak politik istimewa. 6], kehendak rakyat diwakili dan diwujudkan dalam diri pemimpin yang teridentifikasi dengan rakyat.

Tiga klaim yang telah diuraikan di muka merupakan upaya kaum populus menafsir demokrasi. Dari klaim tersebut dapat disimpulkan

bahwa populisme merupakan seperangkat klaim yang berpusat pada antagonisme antara rakyat dan elite sebagai keadaan dasar politik, logika politik sebagai pertarungan semua atau tidak sama sekali, dan legitimasi demokrasi sebagai masalah pengakuan sebagian rakyat sebagai satu-satunya rakyat sejati.

Kaum populis dan kaum demokrat memiliki tafsir yang berbeda tentang demokrasi. Untuk menunjukkan perbedaan keduanya, perhatikan tabel berikut:

No.	Kaum Populis	Kaum Demokrat
1.	Dikotomi rakyat sejati dengan elite korup	Persatuan dan kesetaraan
2.	Eksklusivitas, representasi hanya dari rakyat sejati	Inklusivitas semua konstituen
3.	Anti-pluralisme, rakyat homogen	Pluralisme, rakyat heterogen
4.	Anti elite	Penerimaan elite dan semua kelompok warga
5.	Mayoritas sebagai kekuatan	Mayoritas sebagai metode
6	Klaim berdasarkan janji kosong, informasi palsu	Klaim berdasarkan data dan fakta
7	Pembatasan media atau kontrol atas media	Kebebasan pers
8	Politisasi media, media digunakan untuk mendukung klaim populis	Informasi media yang objektif, transparansi media
9	Strategi pesohor sebagai strategi politik	Perdebatan politik sebagai strategi politik
10	Penindasan masyarakat sipil dan oposisi politik	Dukungan masyarakat sipil dan oposisi politik
11	Mengontrol kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif	Pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif
12	Monoarki	Diarki

Sumber: Pius, 2023

Dari tabel di muka, disimpulkan bahwa walaupun sama-sama menggunakan terminologi rakyat, mayoritas dan pemilihan umum, kaum populis dan demokrat, memiliki pandangan berbeda terkait strategi dan gaya politik. Kaum populis menekankan strategi *eksklusif* untuk ‘memagari’ rakyat sejati dari ancaman elite, sebaliknya kaum demokrat melancarkan strategi *inklusif* sehingga

demokrasi menjadi ruang terbuka bagi semua komponen dalam masyarakat. Populisme menekankan gaya politik berdasarkan klaim permanen atas rakyat sejati dengan mengontrol kekuasaan yudikatif dan eksekutif berdasarkan prinsip *monoarki*. Demokrasi sebaliknya menonjolkan klaim berdasarkan fakta dengan mempromosikan pemisahan kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif berdasarkan prinsip *diarki*.

4. Kesimpulan, kontribusi, alur baru, keterbatasan dan agenda penelitian mendatang

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di muka, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pertama, duduk persoalan representasi populis ditandai dengan munculnya palingan *konstruktivis* dalam representasi politik. Palingan *konstruktivis* merupakan salah satu bentuk tanggapan terhadap serangkaian perubahan sejarah dan politik dalam pemerintahan perwakilan, terutama dengan adanya transformasi dari demokrasi partai menjadi demokrasi populis. Transformasi ini memberikan keuntungan bagi politisi karismatik yang mengandalkan lembaga survei, konsultan media, dan penasihat citra dalam mengklaim dirinya sebagai juru bicara rakyat.

Kedua, Urbinati membaca munculnya fenomena populisme lewat paham representasi sebagai perwujudan kehendak rakyat. Melalui paham ini, pemimpin populis dipandang sebagai figur yang menyatukan beragam klaim dari berbagai kelompok masyarakat. Pemimpin tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang mengadvokasi berbagai kepentingan berdasarkan prinsip akuntabilitas sebagaimana dipraktikkan dalam demokrasi perwakilan, tetapi sebagai figur yang menyatukan beragam kelompok dengan klaim-klaimnya untuk mencapai konsensus sebagai perwakilan masyarakat dan negara. Apa yang diusulkan populisme dengan representasi sebagai perwujudan adalah untuk mengisi kesenjangan dengan identifikasi emosional seluruh rakyat dengan seorang

pemimpin. Mereka menafsirkan krisis politik perwakilan sebagai krisis otoritas. Karena itu, kaum populis mengusulkan seorang pemimpin yang mampu menciptakan subjek kolektif melalui propaganda yang efektif.

Ketiga, Urbinati mencermati tiga metamorfosis representasi sebagai perwujudan rakyat dalam demokrasi modern. Tiga metamorfosis tersebut dapat dianalisis dari wacana yang digunakan: *pertama*, ketika perwakilan karismatik mengklaim membangun kelompok yang diwakilinya; *kedua*, dalam palingan teologi politik republikan, dan *ketiga*, dalam reinterpretasi demokrasi radikal tentang representasi identitas. Terkait transformasi pertama, ketika perwakilan mengklaim mengonstruksi kelompok yang diwakilinya. Klaim ini dapat dianalisis lewat retorika kaum populis tentang kemenangan elektoral sebagai tindakan “mengambil kembali rakyat”, seolah-olah rakyat ada sebelum perwakilan dan sebelum kemenangan kaum populis, rakyat benar-benar tidak terwakili, dan seolah-olah mayoritas sebelumnya tidak benar-benar legitim. Transformasi kedua dalam representasi sebagai perwujudan kehendak rakyat adalah palingan teologi politik republikan. Menurut Urbinati, nabi merupakan figur yang tepat untuk memahami palingan teologi politik republikan sebagai juru bicara rakyat.

Ketiga, strategi politik kaum populis mentransformasi makna rakyat, mayoritas dan pemilihan perwakilan dilandasi oleh model pembacaan strategis Urbinati yang menggunakan pendekatan ideasional dan diskursif dalam memahami populisme.² Pendekatan ideasional dipengaruhi oleh pemikiran Mudde dan Kaltwasser yang mendefinisikan populisme sebagai ideologi yang menganggap masyarakat dipisahkan menjadi dua kelompok homogen dan antagonis, ‘rakyat murni’ versus ‘elite korup’, dan yang berargumen bahwa politik harus menjadi ekspresi dari *volonté*

² Nadia Urbinati, *Me The People: How Populism Transforms Democracy* (Massachusetts: Harvard University Press, 2019), 49-52.

générale (kehendak umum) rakyat.³ Para peneliti yang bekerja dalam paradigma ideasional setuju pada sentralitas tiga elemen populisme: rakyat, elite, dan kehendak umum. Sedangkan pendekatan diskursif dipengaruhi oleh pemikiran Ernest Laclau yang mendefinisikan rakyat sebagai kemungkinan dari setiap proyek politik dan merupakan subyek politik itu sendiri. Jika rakyat adalah subyek politik, maka populisme adalah logika politik. Sebagai logika politik, rakyat merupakan penanda kosong [*empty signifier*], seperti bejana konseptual yang bisa diisi apa saja berdasarkan wacana dan retorika kaum populis.⁴

Keempat, jika diteropong dari lensa diarki dan realisme politik yang, representasi populis yang digelorkan kaum populis berkaitan dengan menguatnya dominasi elite dalam formalisme dan informalisme politik yang berada dalam tegangan permanen antara legitimasi dan kepercayaan, keputusan dan penilaian, rakyat dan elite, pemerintah dan yang diperintah, yang mewakili dan yang diwakili, dalam institusi dan di luar institusi, dan yang politik dan yang sosial.

4.2 Kontribusi

Kontribusi keilmuan yang disumbangkan dari penelitian ini adalah terkait pandangan tentang populisme dan tawaran solusi yang ditawarkan. Urbinati berargumen bahwa populisme berpotensi merusak demokrasi karena mengubah baik gaya, bentuk maupun isi wacana publik sehingga dilihat sebagai parasit demokrasi. Untuk memproteksi kerusakan demokrasi akibat gempuran populisme, Urbinati menawarkan prinsip *diarki* [kehendak dan opini] sebagai dua kekuatan yang dimiliki warga negara demokratis. Berbeda dengan Urbinati, penulis berargumen bahwa fenomena populisme yang muncul dalam pemerintahan demokratis berciri ambivalen, di

³ Cas Mudde and Cristobal Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2017), 6.

⁴ Ernesto Laclau, *On Populist Reason* (London, England: Verso, 2005), 7.

satu sisi merusak demokrasi sebagaimana diungkapkan Urbinati, tetapi di sisi lain merupakan bayang-bayang yang selalu menyertai demokrasi. Karena berciri ambivalen, populisme memiliki wajah ganda seperti wajah dewa Janus dari mitologi Romawi kuno yang darinyalah kata Januari berasal. Satu sisi melihat ke masa depan, siap menyongsong yang tak terduga dan yang sedang datang tetapi di sisi lain memandang ke belakang yaitu ke masa lalu, seakan tak mau meninggalkan yang silam. Persis seperti bulan Januari kita sadar bahwa hari-hari baru sudah tiba, tapi kenangan pada yang silam tetap enggan beranjak. Seperti dewa Janus itu pula wajah populisme menampilkan dirinya dalam demokrasi. Pada satu sisi dalam gambaran ideal, populisme selalu membayangi pengejaran kemilau cita-cita demokrasi yang berkomitmen membawa politik kepada rakyat dan membawa rakyat kepada politik. Dengan demikian rakyat menemukan kedaulatannya sehingga hak-haknya sebagai warga negara demokratis diperhatikan dan kerinduannya untuk diperlakukan setara dan mendapatkan keadilan diakomodasi. Namun di sisi lain, dalam wajah aktualnya, populisme sering kali dipakai sebagai instrumen untuk membenarkan politik *eksklusi* terhadap oposisi dan minoritas, menerjang prosedur dan proses politik yang telah diatur oleh lembaga-lembaga politik yang penting bagi demokrasi, menjadi sarang KKN [korupsi, *klientelistik* dan nepotisme] dan sebagai justifikasi untuk melanggengkan *status quo*.

Karena berciri ambivalen, penulis berargumen bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang rentan mengalami pembusukan tidak cukup diproteksi dengan menonjolkan prinsip '*diarki*' sebagaimana direkomendasikan Urbinati, tetapi juga perlu dilengkapi dengan menekankan pentingnya pendidikan politik kritis, inklusif dan plural. Unsur kritis berkaitan dengan paradoks yang melekat pada tubuh demokrasi: 1] Semakin demokratis kehidupan politik, semakin tidak seorang pun atau kelompok mana pun yang menopang kedaulatan rakyat; 2] semakin kabur sosok dan *locus* kekuasaan berdaulat, semakin membara menghapus kekaburan itu dengan menetapkan kejelasan melalui *ideologisasi* rakyat dan kedaulatan rakyat; 3] 'semakin banyak kebebasan, semakin sedikit kesamaan, dan semakin

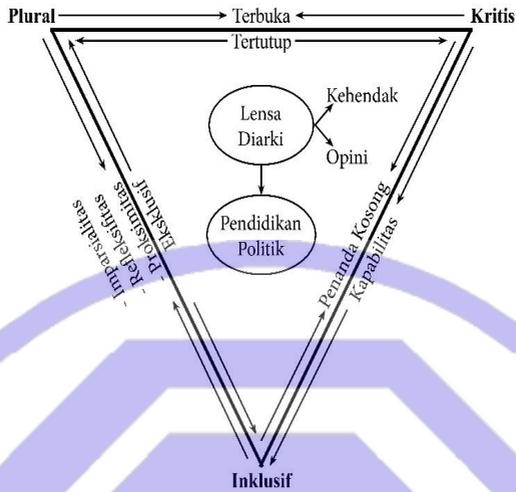
banyak kesamaan, semakin sedikit kebebasan’;⁵4] semakin inklusif tatanan masyarakat dalam negara demokratis, semakin terlihat siapa rakyat atau kelompok yang *dieksklusi* dari tatanan tersebut; 5] ‘semakin semangat publik tidak diperlakukan sebagai prasyarat tatanan sosial demokrasi, semakin pasokan semangat publik lenyap’;⁶ 5] semakin elite mendominasi proses pengambilan kebijakan publik, semakin rakyat tersingkir dari proses dan prosedur demokrasi; 6] semakin elite mengabaikan kehendak rakyat, semakin banyak kelompok yang melakukan perlawanan terhadap elite; 7] semakin institusi formal demokrasi menjauhkan diri dari kepentingan dan kehendak rakyat, semakin banyak institusi politik informal yang mengklaim memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dari beberapa paradoks yang diuraikan di muka, dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan populisme merupakan bentuk politik berciri situasional, realis dan kontingen yang perlu dipahami dalam logika tegangan: kepastian dan ketidakpastian, legitimasi dan kepercayaan, kebebasan dan kesamaan, *inklusi* dan *eksklusi*, publik dan privat, elite dan rakyat, formal dan informal. Untuk menghidupi logika tegangan tersebut, pendidikan kritis yang berfokus pada pengembangan kapabilitas menjadi prasyarat yang tidak boleh tidak dilakukan. Unsur plural hendak menyatakan bahwa dalam demokrasi ada dua unsur konstitutif yang saling berkaitan yaitu pluralisme kepentingan dan nilai yang dimiliki bersama dalam kelompok, dan keterbukaan masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Unsur inklusif hendak mengatasi strategi politik eksklusif kaum populis dengan menonjolkan politik inklusi yang terbuka bagi semua bagian dalam masyarakat dengan memperhatikan aspek imparisialitas, refleksitas dan proksimitas.

Untuk memperjelas kontribusi keilmuan yang disumbangkan penelitian ini perhatikan gambar berikut:

⁵ George H. Sabine, “The Two Democratic Traditions,” *The Philosophical Review* 61, no. 4 (1952), 542.

⁶ Albert Otto Hirschman, *Rival Views of Market Society and Other Essays* (Lanham: Penguin Classics, 1986), 155.



Gambar 6.2 Pendidikan Politik

Gambar di muka memperlihatkan tiga pokok penting. *Pertama*, walaupun kaum populis melakukan pemujaan terhadap rakyat dengan retorika ‘kembalikan kedaulatan kepada rakyat’ atau ‘dengarkan suara rakyat’, namun mereka menganggap rakyat hanya sebagai penanda kosong [*empty signifier*]. Sebagai penanda kosong, rakyat dalam wacana kaum populis, bisa diisi apa saja berdasarkan kepentingan politik mereka. Karena itu, peningkatan kapabilitas rakyat menjadi agenda politik yang tidak boleh tidak dilakukan.

Kedua, walaupun berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat namun mereka hanya memuliakan rakyat yang dianggap baik dan benar dengan mengecualikan mereka yang berada di luar kategori rakyat baik dan benar sebagai bukan rakyat, bahkan dianggap sebagai musuh rakyat. Dengan kata lain, keberpihakan kepada rakyat yang digelorakan kaum populis tidak berurusan dengan kedaulatan warga dalam politik modern, tetapi berisi imajinasi mengenai siapa pembawa keutamaan paling benar dalam suatu komunitas politik. Oleh karena itu, proyek demokrasi yang berdiri tegak di atas prinsip

imparsialitas, refleksitas dan proksimitas menjadi agenda mendesak untuk diwujudkan.

Ketiga, walaupun kaum populis memiliki agenda politik ‘membawa rakyat kepada politik dan membawa politik kepada rakyat’, namun mereka cenderung mempraktikkan politik ‘gelembung’ sehingga tidak terbuka terhadap berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat. Karena itu, demokrasi terbuka untuk semua warga menjadi penting untuk dipromosikan.

4.3 Alur Baru

Bertitik tolak dari kontribusi keilmuan yang diuraikan di muka, penulis menemukan tiga alur baru dalam memahami politik yang berciri situasional, realis, dan kontingen.

Pertama, terkait lensa dalam membaca realitas politik. Realitas politik yang berciri situasional, realis dan kontingen tidak hanya dibaca dengan satu lensa, tetapi perlu dibaca dari berbagai lensa sehingga kita dapat mengungkap tegangan yang terkandung dalam realitas politik. Lensa yang dimaksud adalah terkait posisi partisipan dalam membaca realitas politik, apakah menggunakan lensa sebagai populis, pluralis, atau elitis. Masing-masing lensa memiliki makna yang berbeda terkait konsep rakyat, politisi, demokrasi, politik, konteks politik, institusi dan peran pemerintah. Bagi kaum populis misalnya, rakyat itu berciri monolit, secara umum baik dan mampu mengorganisasi diri, kaum elitis sebaliknya berargumen bahwa rakyat itu monolit, tidak terorganisir dan kurang terdidik sehingga perlu diberdayakan. Berbeda dengan kaum populis dan elitis, kaum pluralis memahami konsep rakyat terdiri atas banyak kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Perbedaan makna konsep rakyat berimplikasi pada perbedaan pemahaman tentang politisi, demokrasi, politik, konteks politik, institusi dan peran pemerintah dalam negara. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Aspek	Populis	Pluralis	Elitis
Rakyat	Monolit,baik, mampu [eksklusi]	Banyak kelompok, beda kepentingan [inklusi]	Monolit,kurang terdidik, miskin [Eksklusi]
Politisi	Tidak kompeten, korup [eksklusi]	Baik tetapi cenderung melanggengkan kekuasaan [Inklusi]	Profesional,baik, teknokrat, peduli [Eksklusi]
Demo krasi	Pemerintahan rakyat [kekuasaan rakyat]	Aturan mayoritas dan menghormati minoritas [bukan kekuasaan siapa pun]	Pemilihan umum untuk kepentingan elite [kekuasaan elite]
Politik	Konflik	Negosiasi	Kerja sama
Konteks politik	Negatif: Fokus pada apa yang hilang [krisis]	Fakta: Fokus pada kenyataan dan berbicara tentang fakta [peringatan]	Positif: Fokus pada apa yang telah tercapai [optimis-harapan]
Institusi	Jangan membatasi kehendak rakyat	Sentralitas institusi sebagai penjamin kebaikan bersama	Institusi melindungi kepentingan elite
Peran Pemerintah	Melindungi rakyat dari musuh internal maupun eksternal.	Membantu warga untuk terlibat mewujudkan kesejahteraan umum.	Pemerintah harus melindungi individu dan memberi ruang bagi persaingan.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa konsep yang sama dimaknai secara berbeda tergantung lensa mana yang dipakai.

Kedua, sebagai pemikir politik feminis, Urbinati dalam sepanjang penelitian ini sangat menghormati proses dan prosedur demokrasi yang terangkum dalam prinsip diarki. Penghormatan terhadap prosedur menuntut setiap warga negara mempunyai kedudukan yang setara dalam proses dan prosedur demokrasi. Dalam prinsip hormat terhadap proses dan prosedur tersebut, demokrasi adalah aturan mayoritas, bukan kekuasaan mayoritas. Hanya dengan memahami demokrasi dengan cara seperti ini, pemerintahan mayoritas dapat dibenarkan sebagai cara untuk mengekspresikan rasa hormat terhadap setiap warga negara sebagai anggota masyarakat yang

setara dan sebagai partisipan yang setara dalam proses demokrasi. Menurut penulis, hormat terhadap prosedur, perlu dilengkapi dengan pendidikan dan budaya politik kritis, plural dan inklusif. Jika tidak, politik jatuh dalam proseduralisme formal.

Ketiga, Urbinati dalam sepanjang penelitian ini, menaruh perhatian terhadap kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan dalam demokrasi, seperti kelompok minoritas dan oposisi politik. Dalam pandangan Urbianti, kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam demokrasi tersebut juga menjadi bagian dari permainan demokrasi yang harus diterima dan dihargai. Karena itu, ketika berbicara tentang representasi, ia sangat menekankan prinsip advokasi dan keterwakilan. Namun kedua prinsip ini, menurut penulis perlu dilandasi dengan payung hukum yang melindungi semua warga negara demokratis. Sebagai pendukung argumen, penulis mengikuti Norberto Bobbio yang menegaskan bahwa ‘hukum dan kekuasaan merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang sama: ‘hanya kekuasaan yang dapat menciptakan hukum, dan hanya hukum yang dapat membatasi kekuasaan.’⁷ Dengan hukum, kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam demokrasi, memiliki hak-hak politik untuk berbicara dan memiliki kesempatan yang setara dalam proses demokrasi.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menjadi peluang untuk menghidupi tegangan permanen yang berawal dari persoalan metafisika politik tentang siapa yang berhak mengisi ruang kosong kekuasaan dalam demokrasi dan berakhir dengan lensa realisme politik yang menekankan tegangan permanen antara politik formal dan informal dalam prosedur demokrasi. Di sepanjang uraian dalam penelitian yang dilakukan, ada sejumlah hal yang belum terpecahkan dan menjadi keterbatasan

⁷ Norberto Bobbio, *The Future Of Democracy* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 20.

penelitian yang dilakukan. Sejumlah yang dicatat adalah sebagai berikut:

Pertama, populisme muncul dari aneka konteks politik yang berciri situasional dan kontingen. Di tengah ciri *kontigensi* politik tersebut, aneka pertanyaan muncul: dari sudut manakah populisme harus dipahami? Apakah sebagai gerakan, strategi politik, gaya komunikasi, logika politik atau ideologi? Sudut pandang penelitian akan menentukan apa itu populisme dan demokrasi, peta pola relasi antara keduanya, siapakah rakyat, bagaimana praktik kedaulatan rakyat, peran masyarakat sipil, hak-hak minoritas, oposisi politik, dan sebagainya.

Kedua, kehendak dan opini dalam pandangan Urbinati merupakan dua kekuatan yang dimiliki oleh warga negara sehingga bisa berpartisipasi dalam proses dan prosedur demokrasi. Partisipasi warga dalam proses dan prosedur demokrasi diwujudkan dengan mengajukan persoalan-persoalan konkrit yang dihadapi masyarakat, memantau politisi, dan mempertanyakan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Ketika membahas hal ini, Urbinati tidak menunjukkan kebijakan apa dilakukan negara dalam melindungi warga yang berpartisipasi dalam demokrasi, terutama ketika dipersekusi atau dirisak [*bully*] oleh mayoritas. Atau ketika warga negara dipaksa '*tutup mulut*' dalam membongkar praktik pembusukan dalam demokrasi demi kepentingan elite. Dengan lain, bagaimana warga negara melindungi dirinya dari tirani mayoritas dan minoritas? Bagaimana menempatkan kekuatan komunikasi politik dalam demokrasi?

4.5 Agenda Penelitian Mendatang

Beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, membuka peluang untuk agenda penelitian mendatang. Beberapa agenda penelitian yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, analisis semantik dari perspektif filsafat analitik terkait varian populisme yang ditinjau dari perspektif sejarah dan sosiologi

politik. Dengan demikian, peneliti tidak terjebak dalam simplifikasi berpikir yang menyamakan populisme dengan fenomena xenofobia, *klientelisme*, atau politik anti keamanan. Populisme ternyata memiliki kerumitan internal terkait logika permainan bahasa yang digunakannya.

Kedua, meneliti populisme dari berbagai perspektif pemikiran, misalnya dari perspektif republikan, liberal, dan demokrat. Kekayaan perspektif akan membawa dampak dalam memahami populisme. Oleh karena itu, populisme bagi sebagian orang merupakan tantangan bagi berfungsinya politik demokrasi kontemporer. Bagi pemikir lain, populisme merupakan indikator masalah politik. Sementara bagi yang lain, populisme merupakan kekuatan radikal yang berpotensi merevitalisasi demokrasi suatu negara. Penelitian dari berbagai perspektif pemikiran tersebut tentu memperkaya pemahaman kita tentang *noumena* di balik *fenomena* populisme.

Ketiga, meneliti dasar-dasar antropologis demokrasi. Proyek penelitian terhadap tema antropologi menjadi penting karena demokrasi berporos pada rakyat dan kedaulatan rakyat. Poros ini selalu berada dalam tegangan permanen karena rakyat dalam demokrasi merupakan penanda kosong yang bisa diisi apa saja berdasarkan agenda politik kaum populis. Rakyat dalam populisme dapat menempel pada konservatisme, sosialisme, totalitarianisme, komunisme, nasionalisme, fundamentalisme agama dan bisa juga melekat pada liberalisme. Di samping itu, rakyat bisa digunakan oleh kaum ideologi kanan, tengah, dan kiri, fasis, kaum liberal maupun republikan.

Keempat, dampak positif dan negatif dari tsunami informasi yang dilepaskan oleh digitalisasi, termasuk kampanye pemilihan umum, data demokrasi, kebijakan pemerintah, kebijakan partai, gerakan masyarakat sipil, dan sebagainya.⁸ Di masa depan demokrasi berbasis algoritma berperan penting dalam mendesain dan mengelola

⁸ Byung-Chul Han, *Infocracy: Digitization and the Crisis of Democracy* (Cambridge: Polity Press, 2022).

kebijakan publik. Bagaimana regulasi pemerintah terkait *e-demokrasi* dan *e-government*?

Representasi populis dan implikasinya bagi demokrasi yang menjadi fokus penelitian ini, menjadi sinyal untuk memikirkan kembali bahwa demokrasi merupakan dinamika politik yang berisi agenda ganda, bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang logam. Di satu sisi demokrasi mensyaratkan perluasan partisipasi rakyat dalam proses politik sehingga terjadi perluasan dan pendalaman demokrasi. Sementara di sisi lain, demokrasi mengandaikan bahwa proses politik termasuk kerumitan institusinya yang semakin sulit dipahami rakyat. Jika sisi pertama berisi agenda ‘membawa rakyat masuk politik’, dan sisi kedua berisi agenda ‘membawa politik kepada rakyat’. Agenda ganda demokrasi ini, bertujuan agar semakin banyak warga terlibat dalam proses politik dan semakin memahami kerumitan infrastruktur demokrasi yang berdiri kokoh di atas pilar kebebasan, kesamaan, dan ketidakpastian.⁹ Jika tidak, demokrasi hanya menjadi dewa yang jauh, secara rutin dipuja namun tidak lagi mengilhami rakyat yang mendambakannya. Terkait hal ini, Herry-Priyono mengingatkan, “kelanjutan kisah demokrasi menuntut kewaspadaan permanen terhadap segala bentuk kekuasaan, baik kekuasaan negara, kekuasaan ekonomi, maupun tribalisme agama.”¹⁰ Apa yang diwaspadai Herry-Priyono, sebelumnya juga pernah menjadi pokok kecemasan Samuel Huntington yang membahas gelombang balik demokratisasi menjadi ‘otoritarianisme baru’ seperti nasionalisme otoriter, fundamentalisme agama, otoritarianisme oligarki, kediktatoran populis, dan kediktatoran komunal.¹¹

Oleh karena itu, untuk menghindari potensi otoritarianisme baru dalam proses dan prosedur demokrasi di tengah menguatnya dominasi elite, kekuasaan harus sirkuler dan tidak pernah

⁹ Jan-Werner Müller, *Democracy Rules* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2021).

¹⁰ Bernardinus Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan Dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About* (Jakarta: Kompas, 2022), 151.

¹¹ Samuel P Huntington, “Democracy’s Third Wave,” *Journal of Democracy* 2, no. 2 (1991): 12–34.

‘digenggam’ atau menjadi ‘milik’ oleh salah satu bagian dari masyarakat, termasuk agenda politik kaum populis. Dalam konteks ini, suara dan mata rakyat merupakan dua modalitas penting dalam menghidupi spirit demokrasi yang selalu berada dalam tegangan permanen antara teori dan praktik, ideal dan real, sedikit dan banyak, mayoritas dan minoritas, di dalam institusi dan di luar institusi, perwakilan dan yang diwakili, elite dan rakyat, lokal dan global, yang sosial dan yang politis. Tegangan permanen tersebut merupakan sinyal yang mengundang kita untuk menyelidiki secara saksama praktik politik formal dan informal yang ‘bergerilya’ di balik jubah demokrasi. Selamat menghidupi demokrasi dalam logika tegangan.



Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini merupakan buah dari kolaborasi dan kerja sama yang baik dari berbagai pribadi dengan perannya masing-masing. Oleh karena itu, saya mengucapkan TERIMA KASIH kepada:

Dr. Karlina Supelli yang dengan sabar telah memberikan yang terbaik lewat bimbingan, peneguhan, dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian disertasi ini. Dari beliau penulis belajar untuk memperhatikan keketatan berpikir, melihat implikasi sebuah pemikiran, dan berani mengakui keterbatasan pemahaman untuk terus belajar.

Prof. Dr. A. Sudiarja sebagai Ko-Promotor I yang telah membantu penulis memahami pemikiran Nadia Urbinati dengan lebih baik lewat diskusi dan bimbingan secara berkala.

Dr. Robertus Robet, selaku Ko-Promotor II, yang telah bersedia menjadi teman diskusi yang baik. Beliau banyak membantu penulis lewat catatan kritis dan masukan dalam proses penulisan disertasi ini, terutama agar penulis berani mengambil ‘jarak’ dan ‘jalan’ berbeda dengan Urbinati.

Prof. Dr. F.X. Armada Riyanto, yang telah memperkenankan penulis untuk melanjutkan studi di STF Driyarkara dan bersedia menjadi penguji disertasi ini.

Yanuar Nugroho, Ph.D. atas kemurahan hatinya untuk menjadi penguji disertasi ini. Terima kasih atas catatan kritis yang diberikan dalam menyempurnakan penelitian disertasi ini. Channel Youtube *Narasi* dan Kuliah *Membaca Tanda-tanda Zaman* yang diberikan dalam Semester Gasal T.A 2021/2022 pada Program Pascasarjana STF Driyarkara, menjadi pelita yang menjaga asa penulis di saat energi meredup dalam proses penelitian disertasi ini.

Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi atas dukungan dan kesediaan menjadi ketua sidang promosi doktor sekaligus penguji. Sapaan dan perhatian Romo dalam proses penelitian ini, meneguhkan semangat saya untuk terus berjuang.

+ Dr. B. Herry Priyono, SJ, guru dan sahabat seperjalanan yang telah membantu penulis memilih tokoh Nadia Urbinati. Romo Herry juga telah membuka cakrawala penulis agar berani masuk dalam 'ketenangan' berjarak sehingga mampu melihat dinamika persoalan *real* politik dengan cermat. Terutama atas waktu istimewa yang diberikan sehingga penulis boleh berdiskusi dalam proses persiapan penulisan disertasi ini lewat bacaan terbimbing.

Dr. David Ragazzoni dari Columbia University of America yang telah membantu penulis dalam memetakan pemikiran Urbinati dalam keseluruhan diskursus filsafat politik. *Thank you very much.*

Profesor Carolyn Evans dari Griffith University Australia, sebagai koordinator seri seminar *Constitutional Populism: Friend or Foe of Constitutional Democracy?* mulai tahun 2021-2023, yang memudahkan proses registrasi seminar *online* secara gratis dengan menghadirkan pembicara seperti Nadia Urbinati, Pierre Rosanvallon Ahli sejarah, Andrew Arato, Jean L Cohen, Jan Werner-Muller, Adam Przeworski, dan Bojan Bugarič.

Prof. Nadia Urbinati, yang bersedia memberikan catatan kritis dan tanggapan atas penelitian disertasi ini lewat wawancara. Sumbangan pemikiran *Professoressa* sangat berguna untuk merawat kegelisahan dalam menghidupi demokrasi di tengah merebaknya gelombang populisme. *Grazie Immensa, Professoressa Urbinati.*

Saudari Christina Udiani, dari Kompas Gramedia yang telah menjadi pembaca kritis atas naskah penelitian ini. Juga kepada Saudara Marcellius Ari Christy dari Penerbit Pohon Cahaya, Yogyakarta yang di tengah kesibukan meluangkan waktu untuk menjadi pembaca naskah ini.

Seluruh pengajar, teman-teman, terutama Angkatan 2019, dan staf sekretariat Program Pascasarjana STF Driyarkara, khususnya Mbak Therisia Asih, Mbak Retno Harjanti, dan Mas Agus Setyono, penulis mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam karena telah membantu banyak hal terkait syarat dan prosedur akademik.

P. Sabinus Lohin, CP; Pater Provinsial Kongregasi Pasionis Indonesia, atas dukungan yang diberikan selama proses penyelesaian disertasi ini.

P. Nikodemus Jimbun, CP, mantan Provinsial Kongregasi Pasionis Indonesia, atas kepercayaan yang diberikan sehingga penulis boleh melanjutkan pendidikan di STF Driyarkara.

P. Damianus Banjarnahor, CP, atas kebaikannya menyediakan logistik yang penulis perlukan demi kelancaran pengerjaan penelitian disertasi ini.

P. Dr. Yosep Pedhu, CP, atas dukungan dan motivasi yang berharga, terutama dalam proses pengerjaan disertasi ini.

STFT Widya Sasana Malang tempat penulis mengajar, atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis menyelesaikan kuliah doktoral dengan baik.

P. Heribertus Ferry Monatolas, CP, Superior Komunitas Provinsialat Pasionis dan anggota komunitas, terima kasih atas kebersamaan yang boleh penulis alami selama proses penelitian disertasi ini.

Akhirnya kepada siapa saja yang menjadi teman seperjalanan penulis dalam proses penulisan disertasi ini, keluarga dan sahabat kenalan, penulis mengucapkan TERIMA KASIH.

Riwayat Hidup

Pius Pandor lahir di Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Flores pada tanggal 7 Mei 1971. Masuk Kongregasi Pasionis pada tahun 1993. Pada tahun 1994 mulai belajar filsafat dan teologi di STFT Widya Sasana Malang. Setelah menyelesaikan strata satu [S1], menjalankan tahun orientasi pastoral di Paroki St. Petrus dan Paulus Nganjuk, Keuskupan Surabaya. Pada 1998-2000 melanjutkan studi Program Pascasarjana di STFT Widya Sasana Malang.

Pada tahun 2001-2002, menjalankan masa persiapan dan diakonat di Paroki St. Petrus dan Paulus Sekadau, Keuskupan Sanggau Kalimantan Barat. Ditahbiskan imam di Paroki Santa Theresia dari Kanak-kanak Yesus Rangga, 26 Juni 2002. Setelah ditahbiskan menjadi imam, berkarya di Seminari Menengah St. Gabriel Sekadau, Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat. Tahun 2004 kursus komunikasi Radio di Interstudi Jakarta. Pertengahan tahun 2004-2005 bekerja di Radio Dermaga Sekadau Kalimantan Barat. Tahun 2005 kursus bahasa di *Istituto Italiano di Cultura*, Jakarta.

Tahun 2006-2009 melanjutkan studi di Fakultas Filsafat Universitas Kepausan Gregoriana, Roma. Di sana, ia mendapatkan gelar Licentiate dalam bidang filsafat [Lic.Phil].

Tahun 2009-2013 mengajar di Universitas Widya Karya Malang. Tahun 2013-sekarang mengajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana Malang. Tahun 2019, melanjutkan studi untuk program doktor di STF Driyarkara, Jakarta. Selain mengajar, ia juga aktif sebagai formator bagi Pasionis muda.

Publikasi Buku

Ex Latina Claritas. Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan. Jakarta: Obor. 2010.

Seni Merawat Jiwa. Tinjauan Filosofis. Jakarta: Obor. 2014.

Publikasi Artikel

[Banyak menulis artikel di berbagai jurnal ilmiah]. Artikel yang dituliskan selama studi di STF Driyarkara adalah:

1. “Objektivikasi Subjek dalam Budaya Kontemporer berdasarkan Konsep Hiperrealitas Jean Baudrillard”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6 (3), 303-315, 2023
2. “Réis, Ruis, Raés, Raos: Frames of Intersubjective Relations of Manggarai People: Philosophical Studies Based on Gabriel Marcel's Concept of Intersubjectivity”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5 (3), 1687-1699, 2023
3. “Mewujudkan Politik Simpatik Dengan Meningkatkan Pendidikan Karakter [Tinjauan dari Perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto)”, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14 [2], 98-109, 2022
4. “Kontribusi Pengakuan Publik dalam Toleransi menurut Anna Elisabetta Galeotti Bagi Persoalan Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama [JISA]* 5[2], 120-134, 2022
5. “Semiotic construction in promoting intercultural communication: A Tiba Meka rite of Manggarai, Indonesia”, *Cultura International Journal of Philosophy of Culture and Axiology* 18 (2), 135-143, 2021
6. “Strengthening student character with Local Cultural Metaphors: Messages Exploration from the Tiba Meka Dance”, *Lingua Cultura Journal*, 15 (2), 135-143, 2022

7. “Menyoal Persahabatan Sebagai Problem Relasionalitas: Sebuah Konstruksi Atas Konsep Alteritas Emanuel Levinas Dan Pluralitas Hannah Arendt”, *Seri Filsafat Teologi*, 30 (29), 66-94, 2020
8. “Pendidikan Karakter Sebagai Solusi Atas Fenomena MCdonalisasi Pendidikan Dalam Era Revolusi Industri 4,0”, *Psiko Edukasi* 18 (1), 1-17, 2020
9. “Transformasi Tiga Pilar Demokrasi Modern dalam Populisme menurut Nadia Urbinati”, *STUDIA : Philosophica et Theologica* 19 (Vol.2), 238-244, 2019

